

Sekali Pendatang Tetap “Pendatang”? Menyibak Sekat “Pribumi-Nonpribumi” di Indonesia

oleh Charles Virgenius dan Henri Damian Sinaga¹ – Malang

Abstract:

Identification of a group of people does not come out of the blue. There is a long history and a lengthy process which makes a group identity comes up. In Indonesia, the ethnic Chinese, formerly called *'orang-orang non-pribumi'* (non-natives, immigrants), are one of many groups of people with their ambiguous identity. Such ambiguity of the ethnic Chinese remains so up to the present day, even though the term *'Cina'* has been altered into *'Tionghoa'*. Their presence has been considered as 'the others' amidst the people of the country and their identity as 'immigrants' has been perpetuated. Nobody knows when such stigma will be over. Although they have been in the country for generations, their status as 'immigrants' seems unchanged. The article tries to explore the background of the natives-immigrants stereotype and the discourse on ethnic Chinese identity in the post-Soeharto era.

Keywords: Etnis Tionghoa, Pribumi, Nonpribumi, “Pendatang”

*“Tidak ada penjelasan mengapa orang Tionghoa
selalu dipersepsikan sebagai orang asing”
(Chang-Yau Hoon).*

1. Pengantar

Di masa Orde Baru (1966-1998), etnis Tionghoa memperoleh hak istimewa dalam mengembangkan ekonomi Indonesia. Namun, hak istimewa ini tidak didukung dalam bidang lain. Mereka tetap dipinggirkan dalam budaya, bahasa, politik dan juga pendidikan. Kondisi ini menyiratkan adanya diskriminasi yang menjadikan etnis Tionghoa sebagai “orang asing” yang hanya “menumpang” di bumi Indonesia. Peristiwa Mei 1998 merupakan bukti dari kekeliruan memahami identitas etnis Tionghoa. Mereka dijadikan kambing hitam atas hancurnya perekonomian Indonesia. Toko dan rumah milik etnis

1 Kedua penulis adalah mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi pascasarjananya di Sekolah Tinggi FilsafatTeologi WidyaSasana, Malang.

Tionghoa dijarah, dihancurkan dan dibakar, banyak orang Tionghoa di serang, dilecehkan bahkan termasuk 152 perempuan diperkosa (Rene L. Pattiradjawane, 2001: 213-252).

Kenyataan pahit ini menyadarkan sekelompok etnis Tionghoa bahwa mereka masih dianggap orang asing di negeri mereka sendiri. Zhou Fuyuan (2003:454), seorang arsitek dari etnis Tionghoa-Indonesia mengatakan:

Kami semakin sadar bahwa kami merupakan sasaran empuk manakala terjadi gejolak politik. Teman-teman saya telah merasa dirinya sebagai orang Indonesia tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan bahwa bagaimanapun mereka dianggap sebagai orang Tionghoa, dan dengan demikian layak diasingkan. Mereka terpaksa sungguh-sungguh berpikir ulang apa artinya ini dan memikirkan orientasi diri mereka.

Berangkat dari kesadaran ini, sebagai reaksi dari peristiwa Mei 1998, banyak usaha untuk mengartikulasikan kembali etnis Tionghoa, tidak hanya dari etnis bersangkutan tetapi juga dari pemeharti budaya dan politik. Mereka berupaya untuk menggugah banyak pihak untuk kembali sadar akan nasionalisme yang terbangun dari aneka budaya dan ras (bdk. Zhou Fuyuan, 2003: 454).

Upaya untuk membentuk harmoni multikulturalisme di Indonesia telah menjadi wacana besar dan ‘pekerjaan rumah’ bangsa Indonesia. Keragaman budaya yang ada di Indonesia bukanlah penghalang. Satu-satunya penghalang adalah mentalitas etnosentris. Dalam hal ini, pemerintah telah berupaya menghapus istilah pribumi-nonpribumi untuk menjadikan sekat yang membentang lebar itu lenyap. Namun, pada kenyataannya, dibutuhkan lebih dari sekedar menghapus istilah pribumi-nonpribumi untuk dapat menyibak sekat pembatas tersebut. Penggambaran identitas yang keliru terhadap etnis Tionghoa telah menjadikan multikulturalisme terasa mustahil. Mereka yang ingin diakui sebagai “asli bangsa Indonesia” harusnya berasimilasi dengan budaya setempat yang telah “ditentukan”. Kenyataan ini tentu justru menjadi langkah mundur dari gagasan multikulturalisme itu sendiri. Bertitik tolak dari “masalah Tionghoa” di Indonesia ini, karya tulis ini disusun sebagai usaha untuk melihat lebih dekat inti permasalahan sekaligus menyibak sekat pemisah “pribumi-nopribumi” di Indonesia. Tulisan singkat ini akan memasukkan unsur historis, tinjauan kultural, hingga dimensi politik.

2. Tinjauan Historis Identitas Tionghoa

Etnis Tionghoa telah lama tinggal di Indonesia, namun identitas mereka belum sepenuhnya diakui. Hal ini tampak jelas dari istilah pribumi dan nonpribumi. Sejak abad ke- 19, usaha asimilasi dengan penduduk setempat

telah dicoba untuk dilakukan oleh etnis Tionghoa, namun hal ini mustahil terwujud karena politik kolonial yang hendak membagi struktur masyarakat menjadi tiga kelompok ras dengan privilese hukum yang berbeda-beda. Kelompok pertama adalah orang-orang Eropa sebagai tingkatan tertinggi dan memiliki privilese di antara kelompok lainnya. Kelompok kedua adalah etnis Tionghoa yang menduduki tingkat menengah. Sementara itu, penduduk asli Indonesia (oleh pihak Kolonial disebut pribumi) adalah kelompok ras terendah. Maka dapat dimengerti setelah orang-orang Eropa berhenti menjajah Indonesia, sekat antar etnis Tionghoa dan kelompok “pribumi” masih ada. Kebencian yang ditanamkan oleh pemerintah Kolonial Belanda telah menjadi bara dalam sekam yang siap menghabiskan sekam itu.

Pada zaman “Orde Lama” Soekarno, identitas etnis Tionghoa terpecah karena keikutsertaan mereka dalam politik, juga karena bujukan nasionalisme Cina Daratan (RRC). Pemerintah zaman Soekarno sempat menertibkan mereka yang memiliki status kewarganegaraan ganda. Pilihannya, menjadi warga negara Indonesia atau kehilangan kewarganegaraan sama sekali. Kondisi ini dilaksanakan secara penuh pada tahun 1960 (bdk. Chang-Yau Hoon, 2012:33).

Rasa bangga berlebihan sebagai etnis Tionghoa menjadi bom waktu yang akhirnya menelan banyak korban jiwa akibat rasa benci yang tumbuh dalam diri mereka yang merasa direndahkan oleh sikap sekelompok orang Tionghoa. Hal ini berpuncak pada peristiwa anti-Tionghoa yang terjadi dari tahun 1965-1967. Peristiwa anti-Tionghoa terutama dipicu oleh isu bahwa Tionghoa adalah pendukung Partai Komunis. Sementara itu, di Indonesia pada masa itu sedang terjadi “pembersihan” besar-besaran dari segala hal yang berbau komunis (bdk. Chang-Yau Hoon, 2012:37).

Setelah era Soekarno berakhir, zaman “Orde Baru” Soeharto mengkonstruksikan etnis Tionghoa sebagai “liyan” sebagaimana diungkapkan oleh Anthony Reid, “Ketionghoan menjadi salah satu ‘si Liyan’ yang paling penting, karena dengan begitulah identitas nasional yang baru mendefinisikan dirinya” (bdk. Grayson J. Lloyd, 2001: 3). Identitas ini dibentuk dari stigma yang dimunculkan terhadap etnis Tionghoa, yaitu eksklusif, kaya, asosial dan berkiblat ke Cina. Dalam kondisi sebagai “liyan”, status kewarganegaraan Tionghoa tampak sebatas formalitas dan tidak realitas. Dengan kata lain, jika seorang dikatakan Warga Negara Indonesia asli, yang dimaksud adalah kaum pribumi, sementara itu etnis Tionghoa biasa disebut sebagai WNI keturunan (bdk. Thung Ju Lan, 2011: 204).

Dikotomi rasial antara pribumi dan nonpribumi di Indonesia dipelihara oleh Orde Baru untuk menguatkan peran dan tanggung jawab kedua pihak. Mereka

yang berstatus nonpribumi mendapat stigma sebagai orang kaya dan dapat menyumbang banyak bagi negara. Akan tetapi, status mereka seolah tetap sebagai pendatang, bukan warga negara sesungguhnya (bdk. Chang-Yau Hoon, 2012:xxxvi). Proses membagi dua kubu, pribumi dan nonpribumi ini telah melahirkan heteroginitas orang Tionghoa di Indonesia. Keragaman yang terjadi lebih dikarenakan oleh faktor geografis dan kebudayaan. Sebagai contoh, etnis Tionghoa di Medan memiliki gaya dan karakter berbeda dengan etnis Tionghoa di Jakarta, Pontianak, Bangka, atau Semarang. Etnis Tionghoa di daerah Singkawang juga berbeda dengan etnis Tionghoa di tempat lain.

Stuart Hall mengatakan bahwa “dalam keadaan sebagai diaspora, orang sering mengadopsi posisi identifikasi yang bergeser, berlapis-lapis atau *hyphenated* (bdk. Stuart Hall, 2000:227). Identitas sebagai kelompok yang tersebar serta tidak diakui secara resmi menjadikan etnis Tionghoa perlu mencari identitas baru dalam hidup bernegara. Maka, istilah seperti nonpribumi diharapkan dihapus dan diganti dengan istilah yang terkesan lebih menerima tanpa banyak perbedaan. Namun, identitas itu sendiri dalam modernitas tidak pernah utuh dan tunggal. Identitas adalah produk dari perbedaan dan pengecualian, daripada sebagai simbol-simbol kesatuan yang terbentuk secara alami dan identik (bdk. Chang-Yau Hoon, 2012:4). Secara legal, keberadaan etnis Tionghoa seharusnya sama dengan keberadaan etnis lain di Indonesia termasuk kelompok ‘pribumi’. Akan tetapi, pada kenyataannya, identitas etnis lain Tionghoa seolah berada dalam suatu stigma negatif yang memberi jarak dengan suku-suku lain.

3. Etnis, Multikulturalisme dan Politik

Keanekaragaman suku, budaya dan bahasa adalah kekayaan bangsa Indonesia yang seharusnya diakui dan diterima semua rakyat dan kalangan dengan hati yang terbuka. Sebelum Indonesia merdeka, sampai pada masa kepemimpinan Soeharto, keanekaragaman budaya itu belum mendapatkan tempat yang semestinya. Di pelbagai daerah masih ditemukan kesenjangan yang besar antara budaya yang satu dengan yang lain. Perpecahan, pelecehan dan tindakan diskriminatif masih terjadi di mana-mana. Ketegangan ini mulai mereda ketika pasca-Soeharto ada kebijakan yang mengarah kepada multikulturalisme meskipun masih berada pada tahap awal. Multikulturalisme itu diakui sebagai kekhasan bangsa ini namun belum ada dukungan penuh dari masyarakatnya (bdk. Leo Suryadinata, 2010:224).

Pada tahap awal ini kebijakan pemerintah yang mengarah kepada multikulturalisme meliputi dua hal, yaitu pemeliharaan hubungan antar-etnis dan

menstrukturkan relasi negara dengan kelompok minoritas. Apakah sebenarnya konsep multikulturalisme itu mengancam kesatuan bangsa Indonesia – atau, membuat budaya yang satu berselisih dengan budaya yang lain? Bagaimana pelbagai etnis yang ada dapat membangun kesatuan bangsa Indonesia?

Pembangunan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan dan dukungan semua etnis yang ada. Bangsa ini bukan hanya dibangun oleh etnis pribumi seperti Jawa, melainkan juga oleh nonpribumi seperti Tionghoa. Ketegangan yang sering terjadi adalah penduduk asli Indonesia yang ingin membangun nasionalisme bangsa menganggap bahwa etnis Tionghoa sebagai sukubangsa yang asing. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila mereka kurang dilibatkan dalam gerakan-gerakan nasionalis selama penjajahan Belanda. Dari sana dapat dipahami alasan penduduk pribumi mengesampingkan orang-orang Tionghoa dalam gerakan nasionalis, meskipun gerakan nasionalis Tionghoa sebenarnya sudah ada dan bertumbuh sebelum munculnya para nasionalis dari penduduk asli (bdk. Leo Suryadinata, 2010:226).

Konsep Tionghoa sebagai sukubangsa asing berawal dari politik kolonial Belanda yang membagi masyarakat pada waktu itu ke dalam tiga kelompok, yaitu orang Belanda sebagai bangsa Eropa, orang Tionghoa sebagai bangsa asing dan orang Indonesia asli sebagai penduduk pribumi. Pembagian ini secara tidak langsung memengaruhi penduduk pribumi dan menganggap bahwa orang Tionghoa sebagai bangsa asing. Disamping itu, perlu diingat bahwa sebelum kemerdekaan seorang tokoh dari etnis Tionghoa yang bernama Liem Koen Hian dilibatkan dalam dunia politik. Hal ini menunjukkan bahwa etnis ini berperan dalam membangun nasionalisme bangsa Indonesia (bdk. Leo Suryadinata, 2010:226.)

Penerimaan dan pengakuan terhadap orang Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia membutuhkan proses yang panjang dan kompleks. Sering terjadi bahwa orang Indonesia asli menutup diri terhadap orang-orang Tionghoa. Selain itu, dalam pelbagai bidang mereka kurang diterima dan diperhitungkan, seperti ada pembatasan untuk menjadi pegawai negeri, militer, menjalankan usaha tertentu, menjalankan kegiatan keagamaan, budaya dan kegiatan yang lain. Selain itu, akses untuk terlibat dalam dunia politik pun semakin sempit, seperti menutup semua surat kabar Tionghoa, kecuali koran harian yang dikelola dan dikuasai oleh militer. Bahkan, dalam dunia pendidikan mereka kurang diberikan kebebasan.

Peraturan diskriminatif di atas baru dicabut pasca-Soeharto ketika muncul gerakan multikulturalisme. Melemahnya kebijakan asimilasi ini memaksa para mahasiswa dan kelompok lain untuk menurunkan Soeharto, karena kekuasaan yang tidak toleran terhadap orang-orang Tionghoa (bdk. Leo Suryadinata,

2010:219,222.). Apabila melihat kenyataan dan pergulatan bangsa Indonesia mengenai kesatuan budaya tersebut, negara ini menjadi sangat sulit untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Orang pribumi menganggap dan mengklaim diri sebagai orang asli yang berhak untuk menempati wilayah di Indonesia sedangkan yang lain tidak. Sekat-sekat ini adalah kelemahan tersendiri yang perlu diatasi khususnya oleh pemimpin bangsa ini.

Pada tahun 1945, Soekarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia telah merumuskan dasar negara Indonesia sebagai kebangsaan. Ini adalah dasar terbaik dan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk Indonesia merdeka dan bersatu pada tahun-tahun selanjutnya. Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno sudah melihat keanekaragaman bangsa ini sekaligus bahaya perpecahan apabila tidak ada pegangan yang pasti. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa Indonesia merdeka didirikan di atas dasar kebangsaan. Itu menghendaki satu *nationale staat*. Secara eksplisit ia juga berterimakasih kepada Tuan Liem Koen Hian yang menyetujui gagasan kebangsaannya. Negara merdeka ini menerima semua penduduknya tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, budaya, tempat, latar belakang dan seterusnya, sebagaimana yang dikatakannya: “Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan yang bulat! Bukan Kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatra, bukan Kebangsaan Borneo, Selebs, Bali atau lain-lain, tetapi Kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu *nationale staat*” (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:75). Soekarno menganggap bahwa etnis Tionghoa sebagai bagian dari negara kesatuan bangsa Indonesia, oleh karena itu tidak ada alasan untuk menyebutnya sebagai bangsa asing. Ia menyebutkan secara eksplisit bahwa etnis ini sebagai suku yang diakui secara sah dan resmi di Indonesia (bdk. Leo Suryadinata, 2010:228).

4. Heterogenitas Kebudayaan - Nilai Budaya Jawa dan Tionghoa

Terminologi ‘Jawa’ dan ‘Tionghoa’ dipakai di sini masing-masing sebagai representasi dari pribumi dan nonpribumi.

Setiap budaya memiliki nilai-nilai yang dianut dan diteruskan dalam tradisi. Demikian pula dengan budaya Jawa dan Tionghoa menganut nilai luhur dan mulia. Budaya masyarakat Jawa yang dimaksud disini adalah orang Jawa Tengah bagian selatan yang berpusat di Yogyakarta dan Surakarta. Sedangkan budaya Tionghoa dalam konteks ini adalah mereka yang lahir di Jawa, lama tinggal di sana serta tersebar di pelbagai tempat di pulau itu, orang-bukan orang Tionghoa yang berasal dari tempat-tempat lain seperti Sumatera, Sulawesi dan seterusnya.

Di Jawa orang Tionghoa dibedakan menjadi dua, yaitu totok dan peranakan. Totok dimaksudkan mereka yang baru menetap, sedangkan peranakan adalah orang Tionghoa yang telah lama menetap di Indonesia. Orang Tionghoa pendatang memegang tradisinya secara ketat sedangkan mereka yang keturunan lebih menyatu dengan budaya pribumi (bdk. P. Hariyono, 1993: 32-33). Dalam banyak hal, keduanya menampilkan ciri khas yang berbeda-beda pula.

Penulis akan menguraikan kesamaan dan perbedaan penghayatan nilai-nilai antara budaya Jawa dan Tionghoa. Pertama nilai menyangkut hakikat hidup. Keduanya menerima bahwa hidup itu adalah sebuah penderitaan dan kesengsaraan. Manusia harus menerimanya sebagai bagian dari dirinya dan berusaha mengolahnya. Disamping itu ia tetap optimis bahwa tantangan itu dapat diatasi dengan caranya masing-masing. Kedua, nilai hidup yang berkaitan dengan karya dan etos kerja. Dalam budaya Jawa ada kecenderungan untuk bekerja sekedarnya atau dengan kata lain kurang termotivasi dalam bekerja dan menyediakan waktu kosong serta menantikan hidup di dunia akhirat, sedangkan bagi masyarakat Tionghoa berkerja dan berbakti demi nama orang tua. Nilai kekeluargaan sangatlah kental dan menonjol dalam budaya ini. Selain itu, mereka berkerja keras di dunia agar dapat memperoleh kebahagiaan di akhirat.

Ketiga yaitu sehubungan dengan relasi manusia dan alam. Kedua budaya ini berusaha hidup selaras dengan alam sebagai bagian yang tidak mungkin dipisahkan dalam konteks makrokosmos, religi-magi. Keempat, kedua budaya ini berorientasi kepada masa lalu, sekarang dan masa depan. Kelima yaitu nilai yang berkaitan dengan relasi antar-manusia. Nilai-nilai dalam masyarakat Jawa menjunjung tinggi tingkah laku yang baik dan sopan terhadap sesamanya. Orientasi terhadap hidup bersama adalah prioritas utama. Dalam budaya Tionghoa, sikap yang sama perlu diterapkan terhadap orang lain, yaitu hormat dan kemampuan untuk merasakan apa yang sedang dialami oleh orang lain. Di atas semua itu, hubungan dengan keluarga mendapatkan penekanan lebih dari pada hubungan yang lain. Bahkan tentang sopan santun, keramahan, hormat dihubungkan dengan relasi di dalam keluarga (bdk. P. Hariyono, 1993: 42,43).

5. Stereotipe Budaya Nonpribumi-Cina

Di pelbagai tempat hubungan orang Tionghoa dan Jawa kurang harmonis. Keduanya membentuk stereotipe dan ada kalanya saling mencap negatif budaya yang lain. Orang Jawa memiliki capnya sendiri terhadap orang Tionghoa dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila masalah

SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) dapat menjadi penyebab kerusuhan dan pertengkaran. Stereotipe mengakar dan bertumbuh karena pendapat negatif yang ada sebelumnya. Konsep negatif tentang budaya lain sulit untuk dipelaskan dan dihilangkan. Akhirnya, pola pikir lama yang dipertahankan ini menjadikan keduanya memiliki fanatisme dan ketertutupan (bdk. P. Hariyono, 1993:57). Stereotipe ini secara langsung membawa dampak yang sangat negatif pula. Dalam tataran sosial, keduanya saling tidak menyapa, tidak ada komunikasi yang baik dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Persepsi dan konsep keliru ini menimbulkan ketegangan yang besar dan tidak jarang berakhir dengan pertengkaran dan kerusuhan.

Orang-orang yang kurang mengenal budaya Tionghoa akan menyebut mereka sebagai orang yang tertutup, egois dan materialistis, suka berpesta pora, walau kadang-kadang disebut juga sebagai orang yang rajin, ulet, tekun dan bertanggung jawab. Padangan jelek terhadap orang Tionghoa ini diwariskan turun temurun dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Mereka dicap sebagai kelompok yang eksklusif yang hanya bergaul dengan orang-orang tertentu saja. Relasi dengan yang lain terjadi pada saat ada kepentingan tertentu. Situasi ini tampak menegangkan pada masa lampau yaitu ketika kolonial Belanda memuji orang-orang Tionghoa dalam berbisnis. Mereka pintar dan cerdas dalam mengelola perekonomian.² Sementara orang-orang Jawa pada waktu itu dijadikan sebagai korban kekuasaan penjajah (bdk. P. Hariyono, 1993:61).

Latar belakang tradisi Tionghoa dalam hal menyenangkan orang tua dan mengadakan upacara meriah membuat mereka harus menyimpan materi. Dalam tradisi Tionghoa nilai-nilai keluarga sangat kental dan memberikan kesan yang sangat rumit. Ada lima hal yang disinggung sehubungan dengan bakti kepada orang tua, sebagaimana yang diambil dalam kutipan berikut ini.

Pertama, seorang anak harus menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Kedua, dalam menghibur orang tua seorang anak harus dapat menyenangkannya. Ketiga, saat orang tua sakit ia harus diliputi rasa cemas. Keempat, dalam masa berkabung ia harus dapat menunjukkan rasa duka citanya yang dalam. Kelima, dalam

2 Bdk. Pada masa pemerintahan VOC orang-orang Tionghoa secara berkelompok mengendalikan perdagangan dan sistem distribusi. Mereka profesional dalam bidang itu, bahkan Jaan Pieter seorang Jenderal VOC mengatakan “tak perlu mengganggu orang Tionghoa karena tak ada seorang pun di dunia ini yang lebih berdedikasi ketimbang mereka. Kerja keras dan keuletan memang menjadi ciri khas mereka, sehingga bisa menghasilkan produksi yang memadai dan menguntungkan dalam dunia perdagangan. (Bdk. Justian Suhandinata. *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2009, hlm. 307)

mengadakan upacara ia harus dapat menyelenggarakannya secara meriah (the saying of Confucius) (bdk. P. Hariyono, 1993:63.)

Oleh karena itu banyak orang yang menafsirkan bahwa pesta meriah dalam budaya Tionghoa sebagai momen untuk menghambur-hamburkan uang, sekalipun itu dilakukan demi menghormati keluarga. Dalam tahap ini, seorang Tionghoa dapat jatuh terhadap cinta akan materialistis apabila ia tidak dapat mengaturnya dan mengelola uang dan harta dengan baik. Konfusius sendiri sebagai guru mereka tidak mengharapkan orang Tionghoa yang materialistis. Sebab ia mengajarkan para pengikutnya agar menyimpan harta benda dengan baik dan bijak (bdk. P. Hariyono, 1993:66).

6. Stereotip Budaya Pribumi-Jawa

Dalam budaya Jawa, hidup sehari-hari lebih banyak diwarnai oleh suasana kebatinan dengan melibatkan alam makrokosmos. Ada tiga unsur dalam kebudayaan Jawa, yaitu raja, tapa dan kekuasaan. Raja adalah status tertinggi dengan kekuasaan dan kesaktian pribadi. Budaya ini menjunjung tinggi susunan hierarki sosial dalam masyarakat. Mentalitas feodal masih sangat terasa dalam budaya ini. Pemimpin dan penguasa sangat dihormati dan diperlakukan secara istimewa. Sikap superioritas sangatlah menonjol dalam budaya ini. Apabila pada zaman dulu kekuasaan pemimpin didukung oleh kekuatan *magi*, pada zaman modern digantikan dengan kekuatan sosial politik yang mengarah kepada kekuasaan. Konsekuensinya adalah koordinasi dan delegasi sangat sulit ditemukan. Dalam kelembagaan, segala sesuatunya hanya diketahui oleh pemimpin sementara bawahan tidak mendapatkan informasi penting. Dampak negatif dari tradisi ini adalah muncul superioritas dan jarak antara pemimpin dan bawahan (bdk. P. Hariyono, 1993:67-68). Tidak jarang pula dalam diri orang Jawa ada kecenderungan untuk selalu dekat dengan pemegang kekuasaan. Terkadang ia akan memberikan sanjungan, agar memperjuangkan kewajibannya sebagai seorang atasan sekaligus demi kepentingan semua bawahan. Istilah lain yang sering disebut adalah “asal bapak senang”, meski kebijakan yang dibuat itu terkadang kurang objektif.

Dikenal pula budaya *rasan-rasan* sebagai sarana untuk mengungkapkan pendapat yang tidak bisa disalurkan. Ungkapan hati yang tidak tersalurkan ini sering juga disebut sebagai *uneg-uneg*. Orang Jawa yang tidak dapat menyalurkan pendapatnya dalam masyarakat sosial akan mengungkapkannya kepada sesamanya dan bukan berbicara langsung dengan pimpinan atau orang yang berwenang. Inilah salah satu cara bersosialisasi dalam budaya Jawa yang mencoba untuk memahami perbedaan satu dengan yang lain dengan cara tidak

mengungkapkan secara langsung mengenai persetujuan atau penolakan terhadap sesuatu hal, melainkan menyimpannya dalam hati dan menceritakannya kepada orang lain. Ia lebih memilih cara yang halus dan sopan agar tidak menimbulkan suasana yang kaku dan menegangkan yang dapat menimbulkan perseteruan (bdk. P. Hariyono, 1993:69).

Selain unsur feodalisme tersebut, dalam tradisi Jawa, tata krama sosial sangat ditonjolkan. Dalam kehidupan sehari-hari ditemukan banyak pemakluman atas tindakan orang lain, yang salah kadang dapat menjadi benar dan demikian pula sebaliknya demi menjaga perasaan orang tersebut. Pada tahap tertentu ia rela untuk menyembuhkan pernyataan negatif dengan menonjolkan sisi positifnya agar tidak terjadi konflik, perbedaan pendapat sehingga situasi aman dan biasa-biasa saja, walaupun sikap ini dapat pula menimbulkan salah paham (bdk. P. Hariyono, 1993:69). Sikap tidak mau mengungkapkan dengan terus terang hal yang salah terutama di depan publik ini adalah ciri khas bagi orang-orang Jawa. Mereka lebih memilih cara yang halus dan lembut dalam menghadapi perbedaan dengan yang lain. Ia tidak suka keras dan ekstrem dalam menanggapi perkataan dan perilaku orang lain.

7. Ambivalensi Hubungan “Pribumi-Nonpribumi”

Etnis Tionghoa secara fisik mudah dikenali lewat tanda-tanda lahiriah seperti warna kulit lebih terang, bermata sipit, berambut lurus, bertulang pipi menonjol dibandingkan kaum “pribumi” (Chang-Yau Hoon,2012:174). Perbedaan fisik ini bukanlah sekat yang besar dalam kehidupan bermasyarakat seandainya sejarah tidak menciptakan jurang yang begitu lebar dan tetap ada hingga sekarang. Ketika pada masa Soeharto, etnis Tionghoa diberi kebebasan untuk mengekspresikan kebudayaan mereka, tampak hal-hal seperti lampion, warna merah, dan baju khas cina telah membuat jurang pemisah antara pribumi-nonpribumi semakin lebar.

Garis imajiner antara pribumi dan nonpribumi semakin jelas dan tegas ketika terjadi perbedaan ekonomi yang semakin signifikan. Etnis Tionghoa dianggap tidak mau berbagi dengan bangsanya sendiri dan hidup berkelompok hanya dengan sesama etnisnya. Namun, di lain pihak, golongan pribumi mengagumi etos kerja, semangat menabung, kedisiplinan, ketelitian, rasionalitas, sikap gesit dan ulet etnis Tionghoa (Chang-Yau Hoon,2012:179). Stereotip positif ini tidak mampu mereduksi stereotip negatif yang telah lama ada di kalangan golongan pribumi. Hal ini juga dapat disebabkan oleh pihak etnis Tionghoa yang kerap memandang rendah dan lemah golongan pribumi, sebagaimana dikatakan oleh Faizal:

Orang Tionghoa menganggap kami kaum pribumi ini malas dan karena itu kami dipandang tidak memiliki etos kerja yang kuat. Mereka menganggap kami ini terkadang hanya menyia-nyiaikan hidup kami sendiri (...) Mereka mengira bahwa kedudukan mereka lebih tinggi maka mereka merasa tidak pantas bergaul dengan kami, karena kalau bergaul dengan kami mereka akan menjadi malas juga, kemudian bisa menjadi bodoh seperti kami (bdk. Chang-Yau Hoon, 2012:181).

Sekat perbedaan antara pribumi dan nonpribumi ini diperlebar pada zaman “orde Baru”. Pemerintah seolah menciptakan kesenjangan ekonomi antara pribumi dan nonpribumi. Etnis Tionghoa diposisikan sebagai “kelompok kuat secara ekonomi” sementara golongan pribumi diposisikan sebagai “kelompok lemah secara ekonomi”. Kondisi ini dimanfaatkan oleh penguasa “Orde Baru” untuk berlindung dibalik generalisasi ini agar usaha menumpuk kekayaan yang mereka lakukan tidak terlihat karena orang kaya hanya berasal dari golongan nonpribumi bukan dari pribumi atau pejabat pemerintah (Arief Budiman, 1999:118). Tidak berhenti pada hal itu, isu sosial juga dihembuskan untuk semakin memperlebar sekat yang ada. Golongan etnis Tionghoa tidak pernah mau turut aktif dalam kegiatan masyarakat serta hanya memikirkan tentang uang saja, sebagaimana dikatakan oleh Ani seorang gadis keturunan Arab yang bekerja di perusahaan swasta di Jakarta,

Acara-acara pertemuan sosial kebanyakan yang hadir orang-orang kami keturunan Arab dan pribumi. Sangat sedikit di antara orang-orang Tionghoa yang mau datang. Hal ini yang sama juga terjadi dalam pertemuan kelurahan. Kami telah memprakarsai acara-acara seperti ini agar mereka membaur. Mengapa mereka begitu individualistic. Maksud saya, hidup mereka hanya untuk diri mereka sendiri [...] Saya juga menganggap mereka itu pelit menyumbangkan atau mengorbankan apa yang telah mereka miliki untuk pembangunan lingkungan kawasan ini. Mungkin mereka itu terlalu mata duitan: hanya uang, uang, uang, dan kerja [...] (bdk. Arief Budiman, 1999:184-185.)

Keluhan-keluhan dari kalangan pribumi pada etnis Tionghoa ini telah menjadi semacam paradigma dan stigma yang sulit dilepaskan dari etnis Tionghoa. Bahkan, bukan hanya sikap dan kebiasaan etnis Tionghoa yang mereka keluhkan, dimensi ruang dan fisik, seperti mal, sekolah, gedung bioskop, bahkan rumah sakit juga dikeluhkan kalangan pribumi. Sebagai contoh kawasan di Jakarta Barat yang didominasi oleh orang-orang etnis Tionghoa memiliki mal yang dianggap sebagai mal “pecinan” yaitu Mal Taman Anggrek, dan tiga universitas swasta yaitu, Universitas Tarumanegara, Universitas Bina Nusantara, dan Universitas Trisakti. Ketiga universitas tersebut memiliki mahasiswa-mahasiswi etnis Tionghoa dalam jumlah yang besar. Dari area tempat tinggal juga terbentang sekat yang lebar. Kaum etnis Tionghoa lebih banyak menghuni perumahan-perumahan elit, sementara kelompok pribumi menempati rumah-

rumah kecil di gang-gang sempit (bdk. Arief Budiman, 1999:223). Reproduksi rasisme ini seolah terus terpelihara tanpa diketahui bagaimana menghentikan atau menjembatannya.

8. “Dosa Asal”: Status “Pendatang”

Identitas sebagai “pendatang” bagi etnis Tionghoa seakan tidak pernah dapat pudah oleh waktu. Kendati mereka telah lama tinggal bahkan beranak cucu di Indonesia, mereka masih dianggap sebagai “pendatang” oleh sekelompok orang. Problematika ini bukan sepenuhnya kekeliruan kelompok pribumi namun juga karena sifat dan sikap etnis Tionghoa yang terkesan membuat jarak. Sebagaimana diungkapkan oleh Petrus (27 tahun) seorang akuntan, bahwa kaum Tionghoa lebih suka berbisnis dengan sesama orang Tionghoa karena dapat lebih di percaya. Ia mengatakan:

Mungkin karena ada pikiran di kalangan sebagian pribumi yang merasa bahwa merekalah yang memiliki Indonesia. Orang Tionghoa dianggap datang ke Indonesia hanya untuk mencari uang dari tanah mereka (...). sebagian orang pribumi mengatakan, ‘Anda tinggal di negeri kami, bukan?’ Oleh karena itu, mereka cenderung menjadikan orang Tionghoa sebagai sasaran tindak kriminal karena mereka mengira tingkat ekonomi orang Tionghoa lebih tinggi (Arief Budiman, 1999:228).

Pendapat ini seolah menegaskan pepatah sekali pendatang tetap pendatang. Hal ini sulit dimengerti oleh etnis Tionghoa yang merasa sudah menjadi bagian dari tanah air Indonesia karena lahir dan besar di Indonesia sejak generasi-generasi sebelumnya.

Konstruksi pemikiran “sekali pendatang tetap pendatang” memosisikan mereka sebagai orang yang hanya “bertamu” dan “tuan rumah” adalah kelompok pribumi. Mentalitas semacam ini mengusik perasaan etnid Tionghoa yang tidak lagi punya gambaran tentang negeri Cina, karena bagi mereka negeri tempat lahir mereka yang mereka cintai hanyalah Indonesia. Pelabelan “non pribumi” pada zaman “Orde Baru” bukan hanya merupakan suatu penghinaan namun juga suatu usaha untuk menjaga agar paradigma dan stigma sebagai “pendatang” tetap melekat pada etnis Tionghoa. Selama tiga dasawarsa kata “Cina” dan “nonpribumi” telah melekat pada identitas etnis Tionghoa. Hal ini seolah menjadi “dosa” bagi mereka, etnis Tionghoa, yang lahir di Indonesia sebagaimana dikatakan oleh Tek Tjhin, “Ketika masih muda, saya pernah diteriaki, ‘Cino, Cino’ oleh orang pribumi. Waktu itu saya merasa terhina. Saya selalu bertanya-tanya kepada diri sendiri mengapa saya diidentifikasi secara berbeda dari orang-orang pribumi” (Arief Budiman, 1999:237).

Kenyataan diri sebagai etnis Tionghoa terkadang juga membuat mereka dari etnis Tionghoa berlaku eksklusif. Mereka memilih untuk tetepa mempertahankan etnis Tionghoa dengan menolak perkawinan antar etnis. Beberapa dari etnid Tionghoa merasa bila putra atau putri mereka menikah dengan orang pribumi, martabat mereka direndahkan. Sikap “menganggap rendah” orang pribumi ini menjadikan stigma negatif yang telah mereka miliki makin kuat dan semakin sulit hilang. Berbagai peristiwa kekerasan anti-Tionghoa yang terjadi menunjukkan bahwa mereka memang belum sepenuhnya diakui sebagai saudara setanah air. Mereka hanyalah pendatang dengan aneka stereotip yang melekat dan bertahan dalam bentangan waktu.

9. Simpulan

Penyelesaian tuntas masalah pribumi dan nonpribumi adalah masalah semua pihak, bukan hanya pemerintah ataupun etnis Tionghoa saja. Ada banyak faktor yang perlu dilihat dan dicermati. Persoalan yang terjadi tampaknya bukan pertama-tama berangkat dari perbedaan rasial, melainkan dari stigma negatif yang melekat. Karena itu, usaha menggagas pembauran pertama-tama adalah usaha untuk mengubah paradigma masyarakat atas stereotipe-stereotipe yang ada. Etnis Tionghoa perlu menyadari bahwa mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia dan sebaliknya etnis lain, khususnya Jawa, perlu mengubah paradigma mereka atas etnis Tionghoa sebagai “pendatang” di bumi pertiwi Indonesia ini.

Sekat primodialisme sebenarnya adalah sekat kecil di antara sekat-sekat yang akhirnya seolah-olah “memisahkan” etnis Tionghoa dari etnis lain di Indonesia. Ada sekat ekonomi, politik, dan sosial yang perlu disingkirkan bila keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa plural, yang sungguh-sungguh memberi ruang bagi setiap etnis yang ada di dalamnya termasuk etnis Tionghoa. Kerusuhan, perusakan, dan pelecehan terhadap etnis Tionghoa adalah manifestasi kebencian yang telah lama tersimpan. Akan tetapi, kebencian ini lebih merupakan representasi “pihak yang harus dikorbankan” demi sebuah “stabilitas politik”. Di sinilah dasar segala fatalisme dan vandalisme kehidupan. Status “pendatang” diberikan tanpa pernah dicabut agar ketika ada sesuatu yang dirasa keliru, “pendatang” inilah yang akhirnya dikorbankan.

Usaha untuk menyibak sekat pribumi dan nonpribumi adalah usaha memaknai kehidupan di tengah keragaman. Kehancuran yang mengatasnamakan agama, etnis atau apapun juga seharusnya tidak terjadi ketika manusia yang satu melihat sesamanya sebagai bagian dari dirinya. Peristiwa Mei 1998 dan juga disusul oleh peristiwa tuduhan “penistaan agama oleh Gubernur Ahok”

adalah bagian kelim dalam sejarah bangsa yang multikultural dan yang menjunjung tinggi persatuan sebagaimana dicantumkan sebagai sila ketiga Pancasila. Stereotipe etnis Tionghoa hasil bentukan pemerintah kolonial Belanda seolah-olah tidak pernah lekang dan terus mengakar tanpa diketahui cara mencabutnya. Kekeliruan konsep terhadap stereotipe ini secara esensial berakar dari identitas yang tetap melekat, yakni "pendatang". Wacana ini adalah sebuah pekerjaan rumah dan harapan idealis yang perlu ditindaklanjuti dalam kehidupan nyata.

Pemecahan masalah Tionghoa ini dapat terjadi bila hubungan antaretnis berangkat bukan dari sikap antipati terhadap perbedaan melainkan sikap simpati terhadap perbedaan yang ada. Sikap ini bukanlah sikap "menolak" atau "menjauhi" perbedaan, melainkan "hidup dengan" perbedaan. Setelah melalui serangkaian usaha untuk "mendamaikan pribumi-nonpribumi", tersisa harapan besar untuk melepaskan identitas etnis Tionghoa sebagai "pendatang" di bumi Indonesia ini. Pertanyaannya, sampai kapankah status "sekali pendatang, tetap pendatang" akan bertahan? Kutipan puisi R. Surya (2012: 271) berikut ini agaknya mewakili cita-cita seluruh bangsa Indonesia.

*Lebih baik kita cari solusi membangun negri ini,
Tanpa curiga di sana sini, pri maupun nonpri.
Masa lalu biarlah berlalu,
Mari kita kubur, meski dengan hati pilu.
Mari kita rawat negri ini dengan cinta kasih,
Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan hati yang bersih.
Siapa yang mau memulai,
Anda atau kami.*

* * * * *

Daftar Pustaka

- Arief Budiman (1999), “Cina atau Tionghoa” dalam Moch Sa’dun M (ed). *Pri-Nonpri: Mencari Format Baru Pembauran*, Jakarta: Cidesindo - Yayasan Adikarya IKAPI - Ford Foundation.
- Fuyuan, Zhou (2003), “Where Do We Belong?”, dalam *Asian Ethnicity* Vol. 4, No. 3.
- Hall, Stuart (2000), “Conclusion: The Multi-Cultural Questions”, dalam Barnor Hesse (ed), *Un/Settled Multiculturalism: Diasporas, Entanglements, Transruptions*, London: Zed Books.
- Hariyono, P. (1993), *Kultur Cina dan Jawa. Pemahaman menuju Asimilasi Kultural*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan..
- Hoon, Chang-Yau (2012), *Identitas Tionghoa Pasca-Suharto: Budaya, Politik, Media*, Jakarta: Yayasan Nabil dan LP3ES.
- Justian Suhandinata (2009), *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Leo Suryadinata (2010), *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Lloyd, Grayson J. (2001), “Chinese Indonesians: Unsettled Past, Uncertain Future”, dalam Michael R. Godley dan Grayson J. Lloyd (eds), *Perspectives on the Chinese Indonesians*. Adelaide: Crawford House Publishing.
- Pattiradjawane, Rene L. (2001), ”Peristiwa Mei 1998 di Jakarta: Titik Terendah Sejarah Etnis Cina di Indonesia”, dalam I Wibowo (ed), *Harga yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, Jakarta: Gramedia dan Pusat Studi Cina.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia (1995), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI): Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Lan, Thung Ju (2011), “Politik Identitas dan Proses Hukum: Konstetasi Etnik Tiongjoa sebagai Subyek Hukum”, dalam Martin Ramstedt dan Fadjar Ibnu Thufail (eds), *Kegalauan Identitas: Agama, Etnisitas, dan Kewarganegaraan pada Masa Pasca Orde-Baru*, Jakarta: Gramedia.